

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelolah dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Soemantri, 2014 :126).

Dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti : pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, kementerian dan lembaga-lembaga Negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberiaan informasi

kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggung jawaban) dalam pengelolaan sumber daya serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dilakukan pertanggungjawaban pada masyarakat, maka konsep pengukuran kinerja juga perlu dilakukan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang

lebih baik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja.

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Untuk meningkatkan kinerja sektor publik, maka diperlukan manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada pengukuran *value for money*. Pengukuran *value for money* merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka sistem kinerja sektor publik juga harus di fokuskan untuk mengetahui ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan pengukuran kinerja diharapkan adanya transparansi dalam menyediakan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah. salah satu untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis *value for money* terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2018:5) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Selama ini kapabilitas dan efektivitas pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian keuangan masih terlalu lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada umumnya lembaga-lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan peran secara efisien. Pemborosan adalah penomena umum yang terjadi di berbagai unit pemerintahan. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besaran alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah

pendekatan *incremental* yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan aset daerah, kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah ini :

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015-2019**

Tahun	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2015	6.883.873.903.633	5.990.424.062.511	5.609.583.728.080	4.497.889.160.889
2016	6.999.258.016.791	6.582.780.929.676	4.496.474.573.009	4.094.471.321.477
2017	8.911.476.779.409	8.193.968.131.799	6.439.523.470.869	5.788.552.526.667
2018	9.196.477.924.456	9.141.371.395.099	7.426.770.057.057	6.763.760.533.371
2019	9.849.942.842.746	9.280.742.072.448	7.074.829.339.229	6.422.760.771.550

Sumber :BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan belanja daerah mengalami fluktuasi yaitu pendapatan tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.5.990.424.062.511. belum mencapai target yang dianggarkan, dan belanja terealisasi sebesar Rp. 4.497.889.160.889. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu terealisasi sebesar Rp.6.582.780.929.676. sedangkan belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 4.094.471.321.477. Realisasi pendapatan pada tahun 2017 meningkat sebesar

Rp.8.193.968.131.799. Sedangkan belanja mengalami peningkatan sebesar Rp.5.788.552.526.667. Selanjutnya tahun 2018 realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp. 9.141.371.395.099. Sedangkan belanja meningkat sebesar Rp.6.763.760.533.371. Dan realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.280.742.072.448. belum mencapai target yang dianggarkan, dan belanja mengalami penurunan sehingga terealisasi sebesar Rp. 6.422.760.771.550.

Laporan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan belanja daerah menunjukkan kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2019 hal ini disebabkan karena terdapat indikasi bahwa daerah belum memaksimalkan penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerah. untuk tahun 2015, 2017 dan 2018 realisasi belanja selalu meningkat tetapi tidak mencapai anggaran yang telah di targetkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.